

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Definisi Persepsi

Persepsi (Hollander dalam Sihwahjoeni dan M. Gudono, 2000) adalah proses-proses pemilihan, pengelompokkan dan penginterpretasikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Sihwahjoeni dan M. Gudono (2000) mengartikan persepsi sebagai proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungannya, melalui panca inderanya. Socrates meyakini orang akan berbuat benar apabila ia mengetahui apa yang baik baginya dan orang yang bijaksana akan mengerti bahwa hal yang paling buruk bukanlah menderita ketidakadilan, melainkan melakukan hal tersebut.

Persepsi etika juga disampaikan oleh Aristoteles, pandangannya berpendapat bahwa etika tidak mungkin mengatur bagaimana manusia harus bertindak melainkan hanya menyediakan semacam visi dan perspektif. Perspektif yang tepat kemudian akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan hati nurani (Ludiana, 2007).

2. Definisi Etika

Etika didefinisikan (Michael Davis dalam Rustiana, 2006) sebagai *“those standards of conduct that everyone (at their rational best) wants everyone else to follow, even if that means that they have follow too”*.

Definisi lain mengenai etika juga disampaikan oleh Mappes dalam Rustiana (2006)

Ethics can be defined as “the philosophical study of morality, and, accordingly, morality is clearly identified as the characteristic subject matter of ethics”.

Etika sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup lebih baik sebagai manusia dan mengenai masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma-norma moral yang umum diterima (Keraf dalam Muthmainah, 2006).

Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi dasar bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya (Bertens, 1997 dalam Ludigdo, 2007). Adapun proses penentuan etika membutuhkan keseimbangan antara pertimbangan dalam diri pribadi dan lingkungan serta pembauran nilai antara etika yang bersifat individu dalam budaya organisasi dengan pengalaman dan pembelajaran yang berproses secara sistematis (Ward dkk., 1993 dalam Ludigdo, 2007).

Ericson menciptakan model awal pengembangan moral dalam bentuk *self-styled* sebagai konsep sosiopsikologis siklus hidup. Pada Tabel 2.1

terdapat *life cycle stages* dimana tabel ini berisi tentang tahapan perkembangan siklus hidup individu dan krisis psikologi yang dialami secara spesifik serta cara mengatasi permasalahan.

TABEL 2.1.
Life Cycle Stages

No	Stage	Psychosocial Crises	Psychosocial Strengths	Radius of Significant Reactions
1	Infancy	trust vs mistrust	HOPE	material person
2	Early childhood	autonomy vs shame doubt	WILL	parental person
3	Play life	initiative vs guilt	PURPOSE	basic family
4	School age	industry vs inferiority	COMPETENCE	neighborhood, school
5	Adolescence	Identity and repudiation vs identity diffusion	FIDELITY	
6	Young Adulthood			
		intimacy and solidarity vs isolation	LOVE	partners in friendship, sex, competition & corporation
7	Adulthood	generativity vs self-absorption	CARE	deviden labor & share household
8	Old age	integrity vs despair	WISDOM	"Mankind" & "My Kind"

Sumber: Ericson (1987) dalam Rianto (2008)

Kolhenberg kemudian menginterpretasikan tahapan siklus Ericson kedalam bagian integral pada Tabel 2.2. dari enam tahapan moral dimana perkembangan moral didasarkan pada konsep perkembangan kognitif Piaget

TABEL 2.2.
Moral Stages

No	Level	Sosial Perspevice	Stages	Correlation to Ericson
1	Preconventional	Personal Individual	1. Heteronomous Morality 2. Individualism, instrumental purpose and exchange 3. Mutual interpersonal expectations relationships and conformity	I II III, IV
2	Conventional	Member of society	4. Sosial sistem and conscience 5. Sosial contracts or utility and individual right	V, VI, VIII VII
3	Postconventional principled	Prior to Society	6. Universal Ethical Principled	VII

Sumber: Kohlberg, 1994 dalam Rianto 2008

Pada tahap *Preconventional Level*

- a. *Punishment and Obedience Orientation*: benar atau salah ditentukan dari konsekuensi fisik sebagai salah satu pilihan, hukuman dihindari.
- b. *Instrumental Concordance Orientation*: kebutuhan seseorang untuk mencari kesamaan tujuan dengan lainnya diakui sebagai tindakan yang

Pada tahap *Conventional Level*

- a. *Interpersonal Concordance Orientation*: perilaku menyenangkan bagi pihak lain, *image stereotip "good behavior"*.
- b. *Society Maintaining Orientation*: perilaku sesuai dengan aturan tetap dan tuntutan sosial.

Pada tahap *Postconventional Level*

- a. *Social Contract Orientation*: perilaku didefinisikan dalam istilah pengujian hak dan persetujuan oleh masyarakat, sudut pandang hukum lebih ditekankan.
- b. *Universal Ethical Principle Orientation*: perilaku yang sesuai dengan hati nurani.

3. Etika bisnis dalam Islam

Al Qur'an sebagai hal yang sangat diyakini oleh umat Islam sebagai kitab samawi yang merupakan petunjuk sempurna banyak mengandung prinsip-prinsip dan petunjuk fundamental untuk menjawab setiap permasalahan hidup, termasuk permasalahan yang berkaitan dengan bisnis. Misalnya, ada beberapa perintah dan larangan yang secara eksplisit dan implisit yang berhubungan dengan transaksi bisnis. Penggalan prinsip-prinsip dasar Al Qur'an mengenai bisnis harus dilakukan, sebab prinsip-prinsip tersebut dijadikan sebagai dasar dan pertimbangan pengembangan dan

memformulasikan konsep bisnis yang islami. Paradigma adalah cara memandang sesuatu, atau model, teori ideal yang dari sudut pandang tertentu sebagai fenomena dijelaskan (Muhammad, 2002:10). Paradigma bisnis adalah gugusan pikir atau cara pandang tertentu yang dijadikan sebagai landasan bisnis baik sebagai aktivitas maupun sebagai entitas. Prinsip-prinsip etika bisnis berprespektif Al Qur'an dibangun dan dilandasi oleh aksioma-aksioma berikut ini:

a. Kesatuan (*unity*)

Kesatuan sebagaimana terefleksi dalam konsep tauhid yaitu memadukan keseluruhan aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi suatu "*homogeneous whole*" atau kesatuan yang *homogeny*, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Berdasarkan aksioma ini pelaku bisnis tidak diperkenankan melakukan diskriminasi, terpaksa atau dipaksa untuk melaksanakan praktek mal bisnis dan menimbun kekayaan atau keserakahan.

b. Keseimbangan (keadilan)

Keseimbangan (*equilibrium*) atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Tatanan ini dikenal dengan Sunnatullah. Perilaku keseimbangan dan keadilan secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis

dimana menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar. Agar kualitas kesetimbangan dapat mengendalikan semua tindakan manusia, maka harus mematuhi beberapa persyaratan antara lain hubungan dasar antara konsumsi, distribusi dan produksi harus berhenti pada suatu kesetimbangan tertentu, “keadaan” perekonomian yang tidak konsisten dalam distribusi pendapatan dan kekayaan harus ditolak. Ekonomi dan bisnis Islam tidak mengakui adanya hak milik yang tak terbatas maupun sistem pasar yang bebas tak terkendali.

c. Kehendak bebas (*Ikhtiyar*)

Berdasarkan aksioma kehendak bebas dalam bisnis berarti manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati atau mengingkarinya. Pada masalah perjanjian, baik perjanjian kesetiaan kepada Allah SWT maupun perjanjian yang dibuat dalam pergaulan sesama manusia haruslah dapat memenuhi semua janji tersebut. Menurut Yusuf Ali dalam Muhammad (2002) tema uqud merupakan konsep multidimensional yang meliputi kewajiban Ilahi yang mengarahkan dari spiritual dan hubungan sesama kepada Allah, kewajiban sosial, kewajiban politik seperti perjanjian dan kewajiban bisnis seperti kontrak-kontrak kerjasama atau kesepakatan

d. Pertanggungjawaban

Tanggungjawab adalah prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu untuk mempertahankan kualitas keseimbangan dalam masyarakat. Konsepsi tanggungjawab dalam Islam mempunyai sifat berlapis ganda (organisasi dan sosial), yang keduanya harus dilakukan secara bersama. Aksioma pertanggungjawaban secara mendasar mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala sesuatu harus mengacu pada keadilan paling tidak dalam menghitung *margin, economic return* bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung dengan teliti dan tidak dapat menggunakan asumsi probabilitas kesalahan nol serta Islam melarang transaksi *alegtoris* yang dicontohkan dengan *gharar*.

e. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam seperti niat, sikap dan perilaku benar, yang meliputi, proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan (laba).

Kebajikan adalah sikap ihsan, yang merupakan tindakan yang memberikan keuntungan bagi orang lain. Dalam pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan. Menurut al-Ghazali dalam Muhammad (2002)

terdapat tiga prinsip yang terkait yaitu memberi kelonggaran waktu kepada pihak terutang untuk membayar utangnya, menerima pengembalian barang yang telah dibeli dan membayar utang sebelum waktu penagihan tiba. Termasuk dalam prinsip ini adalah kesukarelaan dan keramahtamahan.

Muthmainah (2006) menyatakan ada beberapa teori yang melekat pada permasalahan etika antara lain teori teleologis, deontologi dan teori keutamaan (*virtue theory*). Dalam etika dikenal teori teleologis yang menyatakan kualitas etis perbuatan dapat diperoleh dengan dicapainya tujuan perbuatan. Dimana teori ini terdiri dari utilitarisme dan egoisme. Utilitarisme menyatakan bahwa suatu perbuatan akan dikatakan etis ketika membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan egoisme mengisyaratkan bahwa satu-satunya tujuan dari tindakan moral setiap individu tidak lain berorientasi pada pemenuhan kepentingan pribadi dan aktualisasi diri.

Deontologi menggambarkan suatu tindakan dianggap memiliki nilai moral jika dijalankan berdasarkan kewajiban. Nilai moral dari tindakan tidak tergantung pada tercapainya tujuan dari tindakan melainkan tergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan itu, dapat diartikan juga walaupun tujuannya tidak tercapai tindakan tersebut telah

4. Kesadaran etis

Muawanah dan Nur dalam Herawati (2007) menyatakan kesadaran etik merupakan respon atau penerimaan individu terhadap suatu peristiwa moral tertentu melalui suatu proses sehingga dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. Lebih spesifik lagi kesadaran etis akutan publik merupakan suatu tindakan sadar yang dilakukan oleh seorang auditor ketika dihadapkan pada situasi dilema etis dalam profesinya.

5. Etika dalam Pendidikan Akuntansi

Sejak tahun 1970-an, Amerika telah melakukan upaya pengembangan matakuliah etika bisnis kedalam kurikulum perguruan tinggi yang mendidik para pelaku bisnis (Bertens, 2000 dalam Ludigdo, 2007). Pada tahun 1999, Universitas Brawijaya menawarkan mata kuliah pilihan etika bisnis dan profesi kepada mahasiswa Jurusan Akuntansi. Perkembangan mata kuliah yang bermuatan etika sebenarnya telah ada dalam mata kuliah dasar seperti keagamaan dan Pancasila, namun secara eksplisit mulai muncul sejak adanya Program Pendidikan Akuntansi (PPAK) sekitar tahun 2003 (Ludigdo, 2007).

Perguruan tinggi sebagai wadah untuk membentuk serta membekali mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja tidak hanya harus membekali lulusannya dalam bidang keilmuan tertentu tetapi juga harus memahami bagaimana sikap etis dalam menghadapi permasalahan. Akutan pendidik sebagai agen penyampai informasi bagi mahasiswa adalah individu yang tepat untuk memberikan bekal pengetahuan etika, karena sebagai seorang pendidik

mereka memiliki tanggungjawab untuk menjadikan anak didiknya sebagai lulusan yang memiliki kompetensi dan sikap etis. Pemahaman tentang etika dirasa sangat berpengaruh pada lulusan akuntan, karena profesi ini kelak akan terikat dengan kode etik profesi ketika bekerja. Nurita (2008) menyatakan bahwa profesionalisme profesi akuntan mensyaratkan para anggotanya untuk memiliki keahlian, pengetahuan dan karakter. Karakter dapat diartikan sebagai kepribadian seseorang yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan etis akuntansi akan berpengaruh terhadap citra dimata masyarakat, pemakai jasa dan daya saing diantara rekan seprofesi.

Profesi akuntansi, memiliki tanggungjawab secara eksplisit yang dinyatakan dengan berbagai kode etik seperti yang diatur oleh AICPA. Clark dalam Rustiana (2006) menyatakan prinsip pertama kode etik ini adalah

“in carrying out their responsibilities as professionals, members should exercise sensitive professional and moral judgment in all their activities”.

Kode etik diperlukan sebagai pedoman dalam menangani situasi etis secara baik dan untuk membantu proses pengambilan keputusan yang tidak hanya legal tetapi juga benar.

Radtke dalam Rianto (2008) menyatakan bahwa pendidikan etika dalam akuntansi didasarkan pada pengembangan moral yang dapat ditingkatkan melalui proses pendidikan. Huss *et. al.*, dalam Rustiana 2006 menyatakan bahwa integrasi etika ke dalam kurikulum akuntansi merupakan suatu tantangan khusus bagi pendidikan akuntansi. Salah satu cara untuk

memfasilitasi proses pembelajaran etika adalah dengan menggunakan pendekatan modular (Mantzke *et. al.*, dalam Rustiana 2006). Model ini memberikan bekal pada mahasiswa akuntansi untuk dapat mengembangkan strategi dan membantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang solid yang didasarkan pada akumulasi pengetahuan akuntansi dan pemahaman isu bisnis yang relevan. Selain membekali mahasiswa dengan pengetahuan etika, pendekatan modular diyakini juga membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan berbagai keahlian dan kompetensi dalam *softskill* seperti kemampuan komunikasi, negosiasi, interaksi, *problem solving* serta keahlian penelitian dalam hal menemukan kode etik yang memadai untuk kasus dilema etis.

Loeb 1988 dalam Rustiana 2006 menjelaskan bahwa pendidikan etika dalam akuntansi memiliki tujuan antara lain:

- a. Mengkaitkan pendidikan akuntansi dengan isu-isu moral.
- b. Pengakuan isu-isu dalam akuntansi yang mempunyai implikasi etis.
- c. Mengembangkan perasaan kewajiban moral atau pertanggungjawaban.
- d. Mengembangkan kemampuan individu menghadapi dilema etis atau konflik etika.
- e. Belajar menyesuaikan dengan ketidakpastian yang dihadapi profesi akuntansi.
- f. Adanya perubahan dalam perilaku etika.
- g. Mengapresiasi dan memahami sejarah serta komposisi semua aspek etika akuntansi dan hubungannya dengan bidang umum etika

Loeb, Huss dan Patterson dalam Rustiana (2006) menyatakan pendidikan etika akuntansi bila dikaitkan dengan independensi memiliki lima tujuan, yaitu:

- a. Menstimulasi imajinasi mahasiswa terhadap isu-isu independensi.
- b. Membantu mahasiswa dalam mengenali isu-isu independensi.
- c. Memperoleh rasa tanggungjawab personal dalam diri mahasiswa tentang independensi.
- d. Mengembangkan keahlian analitis mahasiswa agar dapat mengevaluasi isu-isu independensi.
- e. Mengajari mahasiswa supaya dapat bertoleransi dengan pihak yang tidak setuju dan ambiguitas independensi.

6. Etika Profesi

Beberapa definisi terkait definisi etika profesi disampaikan oleh beberapa ahli, antara lain:

- a. Bonyton, Johnson dan Kell dalam Hery dan Marrina (2007)

“Professional ethics must extend beyond moral principles. They include standards of behavior for a professional person that are design for both practical and idealistic purposes”.

- b. Haryono Yusuf dalam Hery dan Marrina (2007)

“Etika profesional lebih luas dari prinsip moral. Etika mencakup prinsip perilaku untuk orang-orang profesional yang dirancang baik untuk tujuan praktis maupun untuk tujuan idealistic. Kode etik profesional dirancang

untuk mendorong perilaku ideal, maka harus dibuat realistis dan dapat dilaksanakan. Agar bermanfaat kedudukan kode etik seyogyanya lebih tinggi dari undang-undang tetapi dibawah ideal”

Sonny Keraf dalam Hery dan Merrina (2007) menjelaskan tentang prinsip-prinsip etika profesi, antara lain:

a. Prinsip tanggungjawab

Tanggungjawab didefinisikan sebagai salah satu prinsip pokok kaum profesional dimana orang yang dianggap profesional adalah orang yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya, bertanggungjawab terhadap dampak pekerjaan, kehidupan, dan kepentingan orang lain, khususnya berkaitan dengan kepentingan orang yang menggunakan jasanya.

b. Prinsip keadilan

Prinsip ini menuntut pelaku profesional untuk menjalankan aktifitasnya secara profesional tanpa merugikan hak maupun kepentingan pihak-pihak yang dilayaninya maupun masyarakat pada umumnya.

c. Prinsip otonomi

Prinsip otonomi adalah prinsip yang dituntut oleh seorang profesional terhadap masyarakat agar mereka diberi kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya.

d. Prinsip integritas moral

Sesuai dengan hakikat dan ciri-ciri profesi, maka integritas moral dapat didefinisikan sebagai integritas serta moral yang tinggi yang dimiliki

seorang profesional sebagai bukti komitmen pribadi untuk menjaga keluhuran profesinya, nama baik serta kepentingan orang lain ataupun masyarakat.

7. Komitmen Profesi Akuntan Publik

Komitmen (Gibson *et. al.* dalam Herawati, 2007) adalah lingkup, identifikasi, keterlibatan dan loyalitas yang diekspresikan seorang individu terhadap organisasi. Organisasi yang memiliki karyawan dengan komitmen tinggi akan meningkatkan daya saing karena memiliki keunggulan yang tidak dimiliki organisasi lain (Herawati, 2007).

Komitmen profesi (Herawati, 2007) adalah tingkat loyalitas individu terhadap profesinya sesuai dengan yang dipersepsikan oleh individu tersebut.

Definisi lain dari komitmen antara lain:

- a. Sebuah kepercayaan pada dan penerimaan terhadap tujuan dan nilai dari profesi, sehingga dengan adanya komitmen diharapkan para anggota melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang ditetapkan dan tanpa adanya paksaan.
- b. Sebuah kemauan untuk melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh guna kepentingan profesi dan berupaya semaksimal mungkin untuk memajukan profesi yang digelutinya.
- c. Sebuah kepentingan untuk memelihara anggota dalam profesi, karena para anggota merasa bahwa profesi tersebut merupakan wadah bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi dan kemampuan yang dimilikinya

Lebih lanjut lagi komitmen profesi auditor adalah keyakinan seorang auditor untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan profesinya sehingga akan muncul loyalitas pada profesi akuntan publik. Kesadaran untuk mematuhi aturan dan kode etik profesi akan mengurangi risiko terjadinya konflik dilema etis sehingga profesionalisme auditor dapat dijaga.

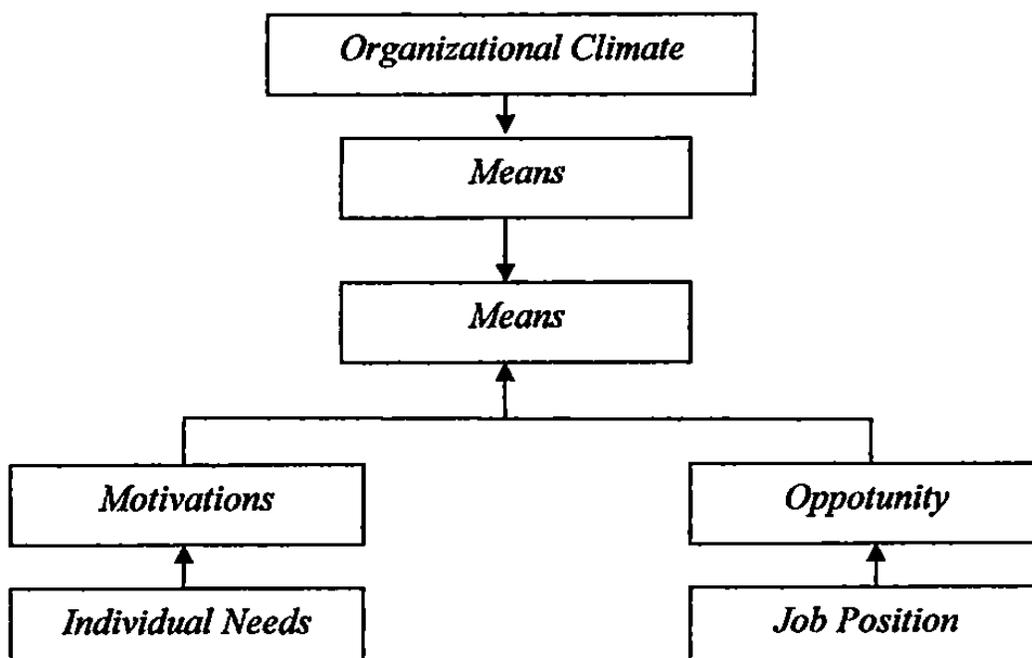
8. Dilema Etis

Permasalahan yang terkait dengan dilema etis merupakan hal yang umum terjadi dalam aktifitas keseharian, apalagi bila dikaitkan dengan dunia profesi. Manusia yang digambarkan sebagai individu yang memiliki nilai individualistik tinggi harus menyesuaikan diri dengan lingkungan terkadang berada dalam situasi yang sulit dimana harus memilih untuk mengedepankan kepentingan bersama atau mendahulukan kebutuhan secara pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Clark dan Dawson (1996) menemukan bukti secara empiris bahwa keberagaman dalam lingkungan merupakan motivasi untuk bertindak etis dan menemukan adanya perbedaan signifikan dalam pertimbangan etis antara responden yang tergolong memiliki latar belakang yang beragam dan yang tidak. Reis dan Mitra (1998) juga melakukan penelitian yang terkait dengan permasalahan etis dimana mereka menguji pengaruh faktor-faktor individual yang menyebabkan perilaku etis dan tidak etis dapat diterima dalam dunia kerja, hasil dari penelitian ini menemukan bukti bahwa *faktor locus of control*, *gender* serta pengalaman kerja mempunyai pengaruh pada penerimaan perilaku etis dan tidak etis di tempat

White dan Lam (2001) mencoba untuk menggambarkan komponen-komponen yang menyebabkan munculnya situasi dilema etis yang ditampilkan pada Gambar 2.1. yang menunjukkan peran dan jangkauan individu organisasi dalam menciptakan dan memecahkan isu-isu etis.

Gambar 2.1. merupakan komponen level makro dari faktor yang menunjang perilaku etis di tempat kerja. Faktor-faktor *means*, *motivation* dan *opportunity* dapat mendorong perilaku tidak etis dalam organisasi. Ludigdo (2005) menyatakan argumentasi bahwa individu lebih suka menghadapi dilema etis jika organisasinya tidak memberikan “*means*” untuk mencegah perilaku tidak etis, individu yang berada dalam organisasi memiliki personal “*motivation*” yang mereka dapatkan dari perilaku tidak etis dan posisi kerja yang memberikan “*opportunity*” untuk melakukan praktik tidak etis.

GAMBAR 2.1.
Komponen Munculnya Dilema Etis



Means dalam hal ini berarti aturan, kebijakan dan prosedur yang secara spesifik mengacu pada tindakan bermuatan nilai etika dalam sebuah organisasi. *Motivation* berkaitan dengan aspek pemenuhan kebutuhan individu dalam berbagai perspektif lingkungan kerja dengan berbagai motivasi yang berasal dari pribadi dan didukung dengan system nilai yang berlaku. *Opportunity* berkaitan dengan posisi kerja serta kesempatan yang dimiliki individu dalam organisasi (Ludigdo, 2005).

9. *Multidimensional Ethics Scale (MES)*

Penilaian situasi dilema etis yang terkait intensitas moral dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan lima konstruk moral yang digambarkan dalam MES (*Multidimensional Ethic Scale*) dari literatur filosofi moral oleh Reidenbach dan Robin (1988) yaitu keadilan (*justice*), *deontology*, *relativism*, *utilitarianism* dan *egoism*. Muthmainah (2006) mendefinisikan kelima konstruk diatas sebagai berikut:

- a. Keadilan (*justice*) mengungkapkan kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap semua orang lain yang berada dalam situasi yang sama dan untuk menghormati hak semua pihak yang bersangkutan. Konstruk *justice* menilai sesuatu dianggap benar apabila telah memenuhi prinsip “formal *justice*” yaitu kesetaraan harus diperlakukan secara setara dan juga sebaliknya.
- b. *Relativism* adalah model cara berpikir pragmatis. Alasannya adalah bahwa aturan etika sifatnya tidak universal, etika dilatarbelakangi oleh budaya dimana masing masing budaya memiliki aturan yang berbeda

beda dan *rules of conduct* masing-masing yang tidak selalu dapat diterapkan atau dipertukarkan dengan budaya lain.

- c. *Egoism* merupakan tindakan berusaha memaksimalkan kesejahteraan individu atau mendahulukan kepentingan yang terkait dengan keuntungan pribadi maupun sebagian kelompok dalam lingkungan sosial. Konstruk ini dipandang etis selama tindakan tersebut mendukung adanya keuntungan atas kepentingan pribadi. Pada akhirnya perilaku ini akan cenderung menjadi *hedonism* dimana tindakan baik atau buruk dinilai berdasarkan kebahagiaan ataupun kepuasan yang diakibatkan oleh tindakannya.
- d. *Utilitarianism* mengatakan bahwa manusia wajib berusaha untuk selalu menghasilkan kelebihan atau akibat-akibat yang baik sebesar-besarnya terhadap akibat buruk apabila kita bertindak. Orientasi konstruk ini menyatakan bahwa moralitas suatu tindakan diturunkan dari konsekuensinya. Secara umum konstruk ini terkait dengan kerangka berpikir perbandingan antara biaya dan manfaat (*cost vs benefit*). Konstruk ini memiliki sifat terbalik dengan konstruk *egoism* karena *utilitarianism* berpandangan bahwa baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan dan akibat akhir yang diterima oleh pihak lain. Dua hal positif yang terkait dengan konstruk ini menyangkut rasionalitas dan universalitas. Rasionalitas terkait dengan tindakan yang dipilih akan mendatangkan keuntungan bagi semua pihak dan universalitas berhubungan dengan alasan akibat atau nilai baik yang hendak dicapai

dapat diukur berdasarkan banyaknya pihak yang menerima manfaat atas tindakan tersebut.

- e. *Deontology* berkaitan dengan tanggung jawab terhadap sesama. Konstruk ini menggunakan pendekatan untuk mengidentifikasi tugas atau pekerjaan yang harus dijalankan dengan keyakinan bahwa individu adalah bagian dari masyarakat dan saling membutuhkan satu sama lain dimana individu memiliki kewajiban pada pihak lain untuk menentukan sesuatu yang benar dan harus dilakukan (*the right thing to do*). Pandangan dasar dari konstruk ini adalah penilaian baik atau buruknya suatu tindakan tidak terlepas dari motivasi, kemauan dan watak dari pelaku seperti halnya kewajiban individu untuk melakukan tindakan yang baik.

B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian etika profesi telah dilakukan didalam dan luar negeri. Didalam negeri penelitian berkaitan dengan etika dilakukan oleh Ludigdo dan Mas'ud Machfoedz (1999), Siwahjoeni dan M. Gudono (2000), Rustiana dan Dian Indri (2002), Rustina (2006), Djaddang (2006), Muthmainah (2006), Henry dan Merrina (2007), Herawati (2007), Rianto (2008). Sedangkan diluar negeri pernah dilakukan oleh Cohen *et al.* (1998) dan

1. Persepsi Etika Mahasiswa Akuntansi dan Auditor Dalam Situasi Dilema Etis Akuntansi

Rustiana (2006) melakukan penelitian untuk menguji perbedaan persepsi etika antara mahasiswa akuntansi dengan auditor dalam situasi dilema etis akuntansi. Situasi dilema etis yang digunakan terdiri dari dua kasus. Persepsi etis diukur dengan menggunakan *Multidimensional Ethics Scale* (MES) yang terdiri dari lima konstruk moral yakni *justice*, *relativism*, *egoism*, *utilitarianism*, dan *deontology*. Perbedaan persepsi antara dua kelompok pada kasus pertama berasal dari konstruk moral: sebagian karakteristik moral dari *justice*, *relativism*, sebagian karakteristik moral dari *utilitarianism*, dan *deontology*. Sedangkan untuk kasus kedua, perbedaan persepsi etis kelompok mahasiswa dan auditor berasal dari konstruk moral: *justice*, *relativism*, *egoism* dan sebagian dari karakteristik moral *deontology*.

Rustiana dalam Rianto (2008) menjelaskan beberapa faktor yang dapat menimbulkan adanya perbedaan persepsi etika pada mahasiswa akuntansi. Faktor yang pertama adalah perbedaan yang berkaitan dengan isu *gender*, dalam pendekatan ini diketahui bahwa pria dan wanita memiliki penilaian dan perlakuan yang berbeda pada pekerjaan mereka. Pria cenderung bersikap agresif dan kompetitif sehingga mereka tidak takut untuk melanggar aturan demi mencapai kesuksesan, sedangkan wanita lebih menekankan pada pelaksanaan tugas secara baik dan harmonis terhadap relasi. Faktor yang kedua yaitu jenjang pendidikan, beberapa penelitian menyatakan bahwa mahasiswa tingkat akhir memiliki perilaku etis dibandingkan dengan

mahasiswa semester awal, ini dapat diasumsikan bahwa dalam proses pembelajaran unsur etika telah disampaikan oleh para akuntan pendidik dan dapat mempengaruhi penilaian mahasiswa ketika diposisikan dalam situasi dilema etis

Pada penelitian Cohen *et. al.*, (1998) dalam tujuh kasus dilematis, mahasiswa akuntansi perempuan lebih sensitif dibandingkan laki-laki di dalam pengambilan keputusan yang melibatkan perilaku tidak etis. Betz *et. al.*, (1989) meneliti 213 mahasiswa jurusan bisnis yang dikondisikan sebagai para professional yang harus melakukan *judgment* sehubungan dengan perilaku tidak etis dan hasilnya adalah mahasiswa laki-laki lebih menunjukkan keinginan untuk melakukan tindakan tidak etis dibandingkan dengan perempuan. Penelitian Betz *et. al.*, juga didukung oleh penelitian Ammen, Guffrey dan McMillan (1996) yang mengungkap kemungkinan hubungan antara *gender* dan keinginan untuk mentolelir perilaku akademik yang tidak etis, menunjukkan hasil bahwa perempuan kurang member toleransi pada tindak kriminal akademik dan perempuan juga jarang terlibat dalam situasi tersebut, artinya sosialisasi gender memiliki pengaruh yang lebih besar pada mahasiswa perempuan dibanding pengaruh struktural yang mereka alami selama mereka menyiapkan diri memasuki dunia kerja.

Muthmainah (2006) melakukan studi tentang perbedaan evaluasi etis, intensitas etis dan orientasi etis dilihat dari *gender* dan disiplin ilmu, menurutnya potensi perekrutan staff professional dalam sebuah KAP kini tidak lagi dibatasi oleh gender maupun disiplin ilmu dikarenakan

permasalahan yang dihadapi saat ini tidak hanya terkait dengan bidang akuntansi sehingga perlu orang-orang yang memahami bidang tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara perempuan dan laki-laki dalam menghadapi situasi dilema etis sedangkan apabila dilihat dari disiplin ilmu maka terdapat perbedaan orientasi etis diantara responden. Hasil pengujian juga menunjukkan terdapat evaluasi etis dan intensi etis dari responden yang berasal dari disiplin ilmu yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat diturunkan hipotesis pertama yaitu:

H₁: Ada perbedaan persepsi etika antara mahasiswa akuntansi dan auditor dalam situasi dilema etis akuntansi.

2. Persepsi Etika Mahasiswa dan Akuntan Pendidik Dalam Situasi Dilema Etis Akuntansi

Henry dan Merrina (2007) melakukan penelitian untuk mengetahui apakah akuntan publik bekerja secara profesional telah memahami pelaksanaan etika profesi yang berlaku dan bagaimana pengaruh antara pelaksanaan etika profesi terhadap pengambilan keputusan akuntan publik. Hasilnya menunjukkan bahwa para auditor yang bekerja secara profesional telah memahami pelaksanaan etika yang berlaku, selain itu independensi, integritas, dan objektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan auditor. Hal-hal yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan auditor adalah ketatuhan dalam penerapan Standar

Umum dan Prinsip Akuntansi, rasa tanggungjawab terhadap klien serta tanggungjawab kepada rekan seprofesi.

Djaddang (2006) melakukan penelitian berkaitan dengan perbedaan intensitas moral dalam konstruk *justice*, *relativism* dan *deontology* pada auditor pria dan wanita dilingkungan kerja menurut umur, pendidikan dan masa kerja. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan berdasarkan *gender*, secara umum auditor wanita memiliki tingkat sensitifitas etika lebih tinggi dibanding auditor pria dengan tingkat perkembangan etika sebagai pengukur moral *judgment* auditor di KAP yang berbeda-beda.

Herawati (2007) melakukan penelitian berkaitan dengan apakah persepsi profesi dan kesadaran etis secara parsial dan simultan akan berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen profesi. Hasil menunjukkan, secara parsial persepsi profesi berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen profesi sedangkan kesadaran etis tidak mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap komitmen profesi.

H₂: Ada perbedaan persepsi etika antara mahasiswa akuntansi dan akuntan pendidik dalam situasi dilema etis akuntansi

3. Persepsi Etika Auditor dan Akuntan Pendidik Dalam Situasi Dilema Etis Akuntansi

Penelitian yang dilakukan Rustiana dan Dian Indri (2002) bertujuan untuk melihat perbedaan persepsi tentang kode etik akuntan antara kelompok *novice accountant* (mahasiswa), akuntan pendidik dan akuntan publik. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa akuntan publik mempunyai persepsi yang

berbeda tentang kode etik akuntan dibanding kedua kelompok akuntan yang lain, sedangkan untuk kelompok akuntan pendidik dan kelompok *novice accountant* (mahasiswa) adalah dua kelompok akuntan yang cenderung homogen, karena berada dalam lingkungan yang sama. Dari penelitian ini dapat diturunkan hipotesis ketiga, yaitu:

H₃: Ada perbedaan persepsi etika antara auditor dan akuntan pendidik dalam situasi dilema etis akuntansi.

4. Perbedaan Persepsi Etika Antara Kelompok Mahasiswa, Auditor dan Akuntan Pendidik Dalam Situasi Dilema Etis Akuntansi

Penelitian yang dilakukan oleh Sihwahjoeni dan M.Gudono (2000) menguji persepsi tujuh kelompok akuntan meliputi akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan pendidik sekaligus akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pendidik sekaligus akuntan manajemen, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik sekaligus akuntan pemerintah dan hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara tujuh kelompok akuntan tersebut.

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Unti Ludigdo dan Mas'ud Machfoedsz (1999) menyimpulkan bahwa akuntan pendidik ternyata cenderung mempunyai persepsi terhadap etika bisnis yang paling rendah dibandingkan dengan rekannya yang berpraktik sebagai akuntan publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Sihwahjoeni dan M. Gudono (2000) serta

Ludigdo dan Mas'ud Machfoedsz (1999) ini kemudian dijadikan dasar untuk menurunkan hipotesis yang keempat, yaitu:

H₄: Apakah ada perbedaan etika antar kelompok mahasiswa akuntansi, auditor dan akuntan pendidik dalam situasi dilema etis akuntansi